

REFERENSI

- Arens, Elder, Beasley, 2006. *“Auditing dan Jasa Assurance”*: Pendekatan Terintegrasi. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Astriani, 2006. “Hubungan antara penyelesaian temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”.
- Aswadi, 2016 “Identifikasi faktor yang mempengaruhi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK (studi kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Bagian Hukum Kab. Mimika, 2008. “Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007”. Buku 1 disusun dan dihimpun oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika Tahun 2008.
- Bastian, Indra, 2014. *“Audit Sektor Publik. Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bohlen Purba, Charles. “Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah” dan Kalimantan Timur”. diakses melalui [13 Februari 2016](#) pukul .16.00.
- Brooks Richard, Pariser Davidet, 1995. “Audit Recommendation Follow-Up Systems: A Survey of the States. dalam jurnal Public Budgeting & Finance /Spring”. 1995.
- Bupati Mimika, 2014. “LKPD Audited Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2014”.
- Creswell, John. W., 2010. *Research Design, Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. edisi ketiga. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hartono, Tri, 2006. “Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja”.
- Mardiasmo, 2002. *“Akuntansi Sektor Publik”*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy, J. 2015. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murwanto, R., Budiarmo, A., dan Ramadhana, F.H., 2006, *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Sektor Publik*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan AKuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI.

Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Keuangan Negara. Jakarta.

_____, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Jakarta.

_____, 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.

_____, 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta

_____, 2010. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Jakarta

_____, 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta.

_____, 2009. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09 Tahun/2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelalporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. Jakarta.

_____, 2008. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.

_____, 2014. Buku V Pemantauan BPK atas Tindak Lanjut rekomendasi. diakses dari www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2014 tanggal 12 Maret 2016 jam 17.00WIB.

_____, 2014. "Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika".

_____, 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKPD Semester I Tahun 2015*. diakses dari www.bpk.go.id tanggal 29 Januari 2016 jam 11.25).

Sugiyono, 2014. "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Bandung: Alfabeta.

Yin, Robert K, 2012. "*Studi Kasus Desain dan Metode*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.